

**EFEKTIVITAS KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA DALAM
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN NONTUNAI (BPNT)
DI KABUPATEN BOGOR**

***THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN
THE DISTRIBUTION OF NON-CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAM
IN BOGOR REGENCY***

Didi Rasdi

Biro Perencanaan, Kementerian Sosial

Teguh Kurniawan

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

ABSTRAK

Kemitraan Pemerintah dan Swasta (*Public-Private Partnership*) dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Bogor mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut diantaranya penyaluran bantuan yang kurang optimal, kuota kebutuhan ewarong yang belum sesuai kebutuhan, serta berbagai kendala teknis lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan manfaat kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial. Teori yang digunakan yaitu Efektivitas Kemitraan dari Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) serta manfaat kemitraan yang dikemukakan oleh Ronald W McQuaid (2000). Efektivitas kemitraan menggunakan dimensi akuntabilitas, nilai bisnis dan insentif, akses, serta responsivitas. Sedangkan untuk manfaat kemitraan menggunakan dimensi sumberdaya dan efektif-efisien. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dilaksanakan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Kabupaten Bogor tidak sepenuhnya efektif. Hal tersebut dikarenakan dari empat dimensi tersebut hanya dimensi nilai bisnis dan insentif yang dinilai efektif terhadap kemitraan pemerintah dan swasta. Sedangkan untuk dimensi akuntabilitas, akses serta responsivitas masih terdapat kendala. Hasil yang terkait dengan manfaat kemitraan, menunjukkan bahwa kemitraan yang dilaksanakan oleh kedua mitra tersebut belum menunjukkan tingkat kemanfaatan yang besar karena terdapat dimensi yang tidak tercapai yaitu dimensi peningkatan kapasitas sumberdaya dan dimensi meningkatkan derajat efektivitas dan efisiensi.

Kata kunci: kemitraan pemerintah dan swasta, efektivitas kemitraan, manfaat kemitraan, penyaluran bantuan sosial pangan nontunai

ABSTRACT

Public-Private Partnership (PPP) in the distribution of non-cash food social assistance (BPNT) program in Bogor Regency experienced various obstacles. Some challenges to be faced were lack of optimization during the distribution of social assistance, the unavailability of ewarong quota reaching minimum requirement and other technical challenges. This research aimed to analyze the effectivity and advantages of partnership between public and private sector on distributing social assistance in Bogor Regency. This research is supported by the theory of effectiveness partnership from Brinkerhoff (2011) as well as the theory of advantage of partnership which was viewed by Ronald W McQuaid (2000). The effectiveness concept uses accountability, business and incentive value, accessibility as well as responsibility dimension. Meanwhile, the advantage of partnership method use resources and effectivity-efficiency dimension. Using post-positivism approach, by qualitative research design using interview and literature review. The result showed that the representative partnership held by the public-private sector within non-cash food assistance distribution in Bogor Regency were not fully effective. It was caused by the four dimensions where only business and incentive value showing positive assessment both for public and private sector. Whereas, the advantage of partnership showed that both partners did not provide big impact yet due to unachieved dimension such as capacity of resource and effectivity-efficiency acceleration.

Keyword : *Public-private partnership, effectiveness of partnership, advantages of partnership, non-cash food assistance distribution*

A. Pendahuluan

Pemerintah dan swasta melaksanakan kemitraan didorong oleh beberapa alasan. Alasan tersebut diantaranya untuk memecahkan permasalahan di masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011), untuk mencapai tujuan sosial (Skelcher, 2007), serta adanya transformasi dan harapan yang besar dari masyarakat untuk perbaikan layanan publik (Forrer et al, 2014). Alasan tersebut mengharuskan pemerintah melaksanakan kerjasama yang baik dengan mitra lainnya. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, kemitraan dilaksanakan dengan mendorong sektor swasta terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dikarenakan pada dasarnya, Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public-Private Partnership/PPP) dipandang efektif dalam membantu pemerintah merespon permintaan barang dan jasa publik, membantu pemerintah dalam melakukan sesuatu secara maksimal dengan dukungan sektor lainnya, serta PPP

berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pada pelayanan publik (Panggabean, 2006).

Kemitraan pemerintah dan swasta dilakukan melalui berbagai upaya seperti pada bidang infrastruktur (Panggabean, 2006), Pengembangan Ekonomi Kecil dan Menengah (Huda, et al, 2018) maupun melalui Pelaksanaan Corporate Social Responsibility/CSR (Brinkerhoff dan Brinkerhoff, 2011). Salah satu pelaksanaan kemitraan (PPP) di Indonesia melalui kerjasama pemerintah dan perbankan dalam penyaluran dana bantuan sosial secara nontunai kepada masyarakat.

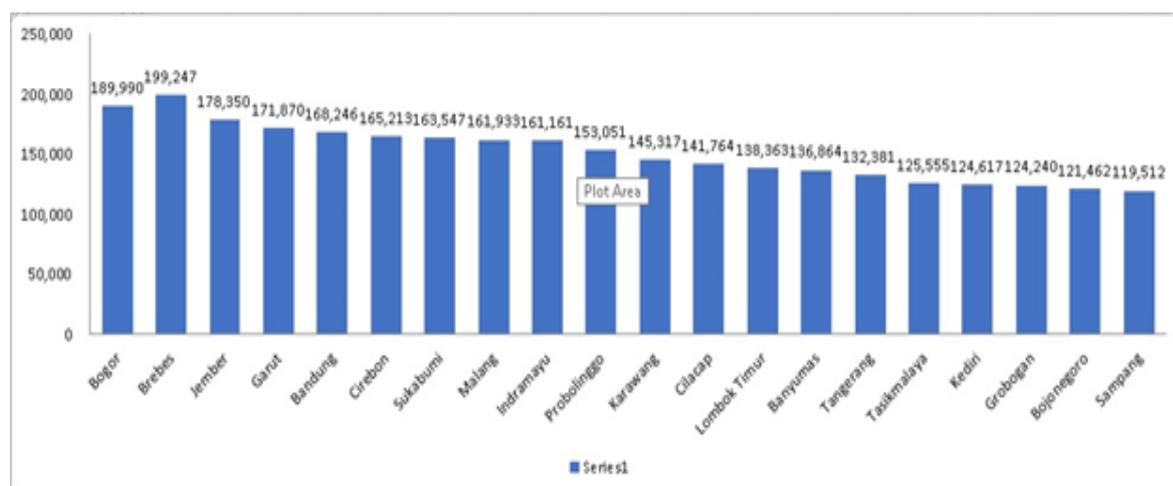
Penyaluran bantuan secara nontunai dilakukan dengan transfer dana yang ditujukan kepada rekening penerima program melalui berbagai kartu bantuan. Pelibatan perbankan dalam penyaluran bantuan sosial didorong oleh berbagai manfaat yang akan diterima seperti memberikan kemudahan, keluasan jangkauan serta akuntabilitas pada implementasi program. Hal tersebut

dikarenakan jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Menurut BPS (2019) Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebanyak 25,14 Juta orang atau 9,41 persen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan didominasi wilayah perdesaaan 15,15 Juta Jiwa atau 12,85 persen dan wilayah perkotaan sebesar 9,99 Juta Jiwa atau 6,69 persen.

Salah satu program prioritas yang menggunakan mekanisme kemitraan melalui kerjasama dengan perbankan adalah Bantuan Pangan NonTunai (BPNT). Pangan dijadikan sebagai prioritas dalam penurunan kemiskinan dikarenakan BPS (2019) menulis bahwa pangan berperan besar dalam penurunan kemiskinan. Kontribusi pangan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,66 persen (BPS, 2019). Hal senada sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ahmad (2001) bahwa

penduduk miskin sebagian besar mengalokasikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan. Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) merupakan transformasi dari program Beras Sejahtera (Rastra) akan diberikan kepada 15 Juta Penduduk Miskin untuk seluruh wilayah Indonesia sampai dengan tahun 2019 (Renstra Perubahan Kemensos, 2019), dan diujicobakan kepada 219 Kabupaten/Kota.

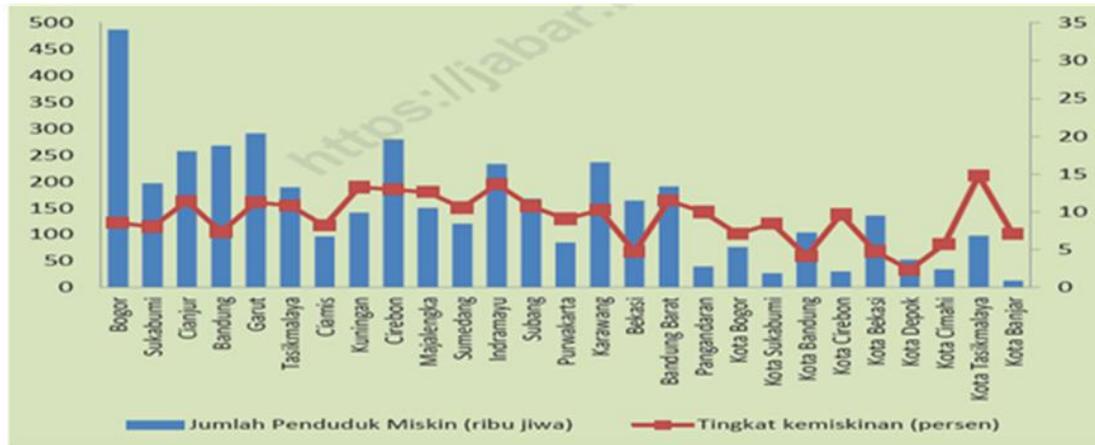
Kabupaten Bogor merupakan bagian dari 219 kabupaten/kota yang melaksanakan program BPNT dipilih sebagai lokus penelitian dikarenakan mempunyai dua alasan pokok yaitu; **pertama** mendapatkan alokasi jumlah penerima program terbesar kedua di Indonesia dan jumlah penerima terbesar di Jawa Barat dengan total 189.990 orang. Perbandingan alokasi dengan daerah lainnya ditampilkan pada Grafik 1 di bawah ini.



Grafik 1. Jumlah KPM BPNT sd Tahun 2018
 Sumber. Data diolah peneliti dari Ditjen Penanganan Fakir Miskin, 2018

Alasan kedua, Kabupaten Bogor merupakan daerah yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbesar dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin sebesar 487,28 ribu Jiwa atau 8,5 persen

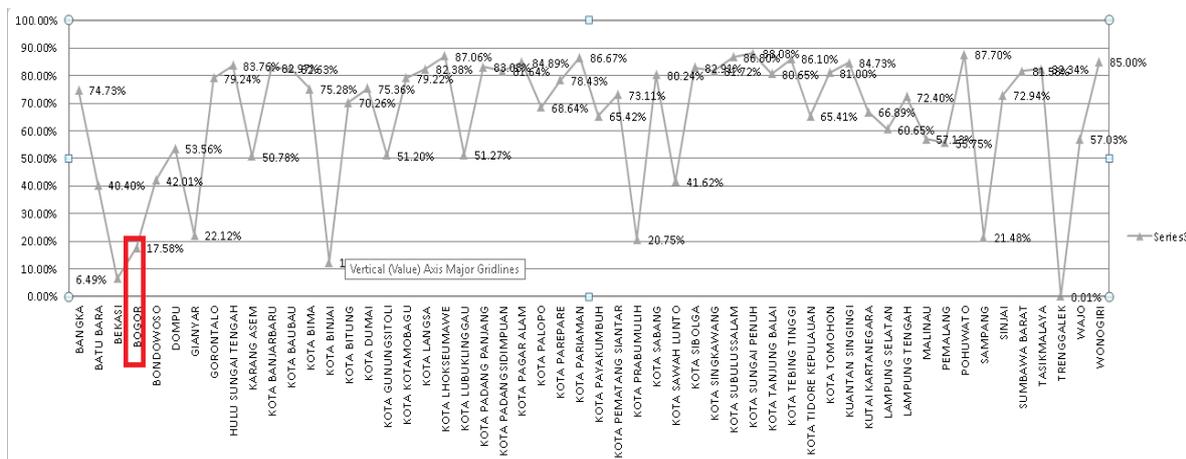
penduduk di Kabupaten Bogor masuk dalam kategori miskin (BPS Jawa Barat, 2018). Perbandingan Kabupaten Bogor dengan daerah lainnya di Jawa Barat terkait dengan penduduk miskin disajikan pada Grafik 2 berikut;



Grafik 2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, 2017
 Sumber. BPS Jawa Barat, 2018

Pelaksanaan BPNT di Kabupaten Bogor mengalami beberapa kendala terutama terkait dengan kemitraan yang dijalankan antara pemerintah dan perbankan/bank penyalur dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, yaitu Pertama adanya presentase penyerapan bantuan hanya sebesar 17.6 persen pada Januari 2019. Hal ini menandakan adanya bantuan yang tidak tersalurkan kepada masyarakat sebesar 82.04persen. Kondisi demikian memperlihatkan terdapatnya kendala kerjasama dalam kemitraan dalam mencapai tujuan bersama yaitu menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan kemitraan belum menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi dari program sebagaimana yang disampaikan Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) kemitraan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pendapat senada disampaikan MqQuaid (2000) bahwa kemitraan mempunyai potensi manfaat yang besar seperti efektif dan efisien dalam meningkatkan program maupun layanan publik, adanya pengalihan sumberdaya pada masing-masing mitra, serta menyebabkan legitimasi yang besar terutama pelibatan aktor lain dalam kemitraan. Adapun penyerapan bantuan disampaikan dalam Grafik 3 di bawah ini.



Grafik 3 Penyerapan Bantuan Tahap V, di 54 Kabupaten/Kota di Tahun 2018
 Sumber : Diolah peneliti dari Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Januari 2019

Kendala kemitraan Kedua, kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan bank penyalur dalam penyaluran bantuan menghendaki tempat yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial. Dari data, Kabupaten Bogor membutuhkan Ewarong sebanyak 722 tempat, sementara total ewarong/agen yang ada sebanyak 377 tempat. Terdapat kebutuhan ewarong yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program tersebut sebanyak 345 tempat (hasil wawancara awal dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor). Hasil kajian dari Microsave (2018) menunjukkan bahwa ewarong rata-rata melayani sekitar 200 sampai dengan 500 KPM, bahkan di Pekanbaru rasio ewarong melayani sekitar 500 sampai dengan 1000 KPM. Hal tersebut menunjukkan hambatan pembagian peran yang dilakukan antara pemerintah dan swasta.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Permasalahan

Pada dasarnya setiap kemitraan yang dilakukan untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam penelitiannya, Singh and Prakesh (2010) menjelaskan bahwa kemitraan dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Tujuan tersebut tentunya agar penyaluran bantuan sosial sampai diterima oleh penerima bantuan dapat berjalan baik dan akuntabel. Lebih lanjut, potensi manfaat yang dapat didapatkan dari kemitraan adalah efektif dan efisien (MqQuiad, 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Pillay (et, al 2014) menjabarkan bahwa efektivitas dan efisiensi dalam kemitraan bisa tidak terjadi dengan perbedaan tujuan bersama dan hubungan yang terjalin diantara mitra. Terdapat beberapa kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta mengalami keadaan yang menyebabkan ketidakefektifan dan tujuan yang tidak tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Klijn dan Teisman (2003) menunjukkan kelemahan pelaksanaan

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Bogor menyebabkan efektivitas kemitraan antara pemerintah dan bank penyalur menjadi terganggu. Dalam memandang kemitraan yang efektif, The Shorter Oxford Dictionary (dalam Hilton, Davis and Lorraine, 2007) mengungkapkan beberapa ciri dari kemitraan yang dipandang efektif yaitu adanya kerjasama yang baik antar mitra dengan prinsip partisipasi dan keterlibatan, terdapat pembagian peran dan kewenangan diantara mitra yang bekerja sama, adanya kemampuan dalam mencapai tujuan, tersedianya tujuan bersama antar mitra, negosiasi, nilai kepercayaan, nilai saling menghormati, keterbukaan, kejujuran serta adanya komunikasi yang baik antar mitra.

kemitraan di Belanda terkait pengorganisasian serta pengambilan keputusan bersama. Osborne (2000), menyatakan bahwa kemitraan tidak akan terjadi dan tidak akan efektif ketika tidak ada kejelasan pada tujuan, peran dan kedudukan yang tidak seimbang, serta terkait pengorganisasian kemitraan. Lebih jauh Suropto (2006) menyampaikan jika kemitraan di Indonesia sering tidak maksimal karena ketidakpatuhan pada kaidah transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, terdapat kendala dalam pelaksanaan kemitraan pemerintah dan perbankan/bank penyalur yang memengaruhi tujuan kemitraan. Sehingga artikel ini akan membahas efektivitas dan manfaat kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Bogor.

2. Tinjauan Pustaka

a. Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Kemitraan yang dibangun pemerintah dan swasta berdampak pada pergeseran peran pemerintah (Forrer, 2014). Pemerintah bukan lagi sebagai pemegang kendali

dalam layanan publik. Kondisi demikian terjadi di Amerika terlihat pada tataran pelibatan aktor lain dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pelibatan tersebut dijalankan dengan harapan tercapainya tujuan yang lebih besar yaitu pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Pergeseran tersebut memungkinkan manfaat yang besar bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) mengungkapkan bahwa manfaat dari dilaksanakannya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta adalah efektif dan efisien pada layanan publik, untuk mengintegrasikan sumberdaya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan, serta mendapatkan solusi bersama diantara berbagai aktor yang saling bekerjasama.

Kemitraan pemerintah dan swasta didefinisikan sebagai sebuah elemen yang terdiri dari unsur mutualitas dan identitas organisasi (Brinkerhoff and Brinkerhoff, 2011). Mutualitas adalah keadaan untuk saling bekerja bersama dalam sebuah kemitraan, unsur mutualitas ini terdiri dari komitmen terhadap tujuan yang disepakati

bersama, adanya kontrol bersama serta pembagian tanggung jawab bersama atas kemitraan tersebut. sedangkan unsur identitas organisasi dipahami sebagai alasan dalam memilih mitra kerja serta kompetensi mitra yang berpengaruh signifikan pada kemitraan. Dengan kata lain, PPP diartikan sebagai kegiatan kolaboratif dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan adanya pembagian resiko, biaya, serta sumberdaya (Van Ham & Koppenjan, 2001).

Lebih jauh, tujuan tersebut terbagi kedalam lima jenis yaitu tujuan kebijakan, tujuan layanan publik, tujuan infrastruktur, tujuan pengembangan kapasitas, serta tujuan pengembangan ekonomi (Brinkerhoff dan Brinkerhoff, 2011). Kelima jenis tujuan tersebut mempunyai dimensi yang berbeda dalam memahami dan menganalisis kinerja yang dapat digunakan. Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai tujuan kemitraan, struktur organisasi yang dapat digunakan, matrik kinerja yang akan dicapai serta dimensi normatif untuk mengukur kinerja tersebut.

Tabel 1. Kerangka Kerja Berdasarkan Tujuan Kemitraan

PPP purpose	Organizational structure and processes	Performance metric	Normative dimensios
Policy	Network Task force Joint committee Special commission	Technical quality Responsiveness Concensus-building Legitimacy	Equity/representativeness Citizen participation Transparency
Service Delivery	Co-production Joint venture Contract Partnership Agreement (MoU)	Quality Efficiency Effectiveness Reaching targeted beneficiaries	Accountability Business value and incentives Access Responsiveness
Infrastructure	Joint venture Build-operate-transfer Build-operate-own-transfer Design-build-operate	Quality Efficiency Value for money Maintenance and sustainability	Accountability Business value and incentives Access Responsiveness
Capacity Building	Knowledge network Twinning Contract Partnership Agreement (MoU)	Skills transfer Intellectual capital Social capital Organizational system and output	Ownership Agency Empowerment Autonomy/Independence
Economic Development	Joint venture Contract Partnership agreement	Poverty reduction Profitability Sustainability	Equity Social inclusion Empowerment

Sumber. Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011)

Berdasarkan tabel kerangka kerja berdasarkan tujuan (purpose base framework). Salah satu tujuan dari dilakukannya kemitraan adalah untuk mencapai pelayanan publik terbaik. Dalam kerangka kerja tersebut, struktur organisasi yang dapat diterapkan adalah dalam bentuk kontrak, perjanjian kerjasama (MoU) atau kerjasama. Kinerja yang akan dicapai dari suatu kemitraan diantaranya kualitas, efisiensi, efektivitas mencapai target manfaat. Pendapat mengenai tujuan layanan publik menurut Torchia et al (2015), kemitraan menjadikan layanan publik lebih efektif dan meningkatkan kualitas pada layanan publik.

Kinerja yang akan menjadi ukuran dari penelitian ini adalah efektivitas dengan struktur organisasi berupa perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta. Sehingga dengan menggunakan model tersebut, dapat digunakan dimensi akuntabilitas, nilai bisnis dan insentif, akses serta responsivitas untuk menganalisis efektivitas kemitraan. Sedangkan manfaat kemitraan menggunakan dimensi yang disampaikan oleh McQuaid (2000) yang terdiri dari dimensi sumberdaya serta efektif-efisien.

b. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan sebuah karakteristik negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara kesejahteraan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang membutuhkan berupa sandang, pangan maupun papan. Pemberian bantuan sosial diharapkan masyarakat miskin dapat bertahan dari berbagai permasalahan sosial maupun ekonomi serta dapat bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya. Selain itu, bantuan sosial merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang memandang bahwa masyarakat miskin mempunyai kesetaraan dalam kemandirian dan kebebasan mengakses sumberdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Daigneault (2014), dalam memahami bantuan sosial setidaknya terdapat tiga paradigma yang dapat dijadikan bahan referensi yaitu (1) *Entitlement Paradigm*, (2) *Workfare paradigm*, dan (3) *Activation paradigm*.

Pertama, paradigma berbasis hak (*Entitlement Paradigm*). Dalam paradigma ini bantuan sosial merupakan hak inklusif setiap warga negara. Hak sosial dipandang sebagai kunci inklusi sosial warga negara. Pada prinsip keadilan sosial paradigma ini memprioritaskan nilai-nilai solidaritas dan egalitarian, dengan peran negara yang sangat penting melindungi warga masyarakat dari ketidakamanan ekonomi. Tujuan paradigma ini mengurangi kemiskinan dengan menjamin tingkat pendapatan yang layak bagi warga negara.

Kedua, paradigma berbasis kerja (*workfare paradigm*). Paradigma bantuan sosial ini menganggap bahwa kebebasan sebagai nilai terpenting dari kesejahteraan bagi individu. Paradigma ini memandang bahwa peran pasar dan keluarga adalah penting untuk mendukung individu berusaha. Paradigma ini memandang ketidaksetaraan adalah alamiah. Budaya ketergantungan terhadap bantuan sosial sangat dihindari dari paradigma berbasis kerja, dan fokus utama masyarakat adalah adanya karakteristik layak atau tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Persyaratan wajib dari pemberian bantuan sosial adalah bekerja sehingga akan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Ketiga, paradigma aktivasi (*Activation paradigm*). Paradigma ini beranggapan bahwa bantuan sosial adalah kontrak antara negara dan individu dan konsepsi hak-hak sosial telah bergerak ke arah tanggung jawab individu. Peran negara dan pasar sangat dominan terkait dengan kesejahteraan. Orientasi ideologis ini konsisten dengan “Third Ways” yang membenarkan intervensi negara asalkan strategis dan tepat sasaran; negara pada dasarnya sebagai pelengkap dari pasar, bukan sebagai pengganti pasar.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode pengumpulan data kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data secara kualitatif dilakukan prosedur wawancara mendalam dan studi literatur. Pemilihan informan berdasarkan teknik purposive sampling karena informan penelitian adalah orang yang mempunyai pemahaman dan adanya keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

Informan penelitian berjumlah 25 orang yang terdiri dari; 4 orang dari unsur pemerintah pusat (Kementerian Sosial), 4 orang dari unsur pemerintah daerah (Dinas Sosial, Bappeda Litbang, serta Sekretariat Daerah), 5 orang dari unsur PT BNI (Persero) Tbk (Divisi Hubungan Antar Lembaga, Kantor Wilayah serta Kantor Cabang), 3 orang tenaga pendamping program, 1 orang agen ewarong, 6 orang Penerima Manfaat Program, 1 Orang Akademisi, serta 1 orang Peneliti.

Adapun keabsahan dan validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data melalui bukti teori, dokumen tertulis, informan utama, serta perbandingan dengan opini informan lainnya. Sedangkan teknik analisa data menggunakan metode tipe ideal yaitu data yang ditemukan dibandingkan dengan kondisi ideal yang harusnya ada menurut teori yang dipegang. Analisa tersebut dapat digunakan dengan membandingkan dampak dari konteks dan analogi.

D. Pembahasan

1. Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai (BPNT) di Kabupaten Bogor

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas terkait dengan hubungan khusus yang dibuat dan kewajiban serta persyaratan yang diterima baik oleh pemerintah maupun pihak swasta (Forrer et al, 2010). Akuntabilitas, dalam

pengertian ini, dapat dilihat sebagai dua sisi yaitu kesediaan untuk mengambil tanggung jawab atas suatu tindakan dan harapan bahwa tindakan ini akan diakui (Milward dan Provan 2006). Indikator dimensi akuntabilitas yaitu:

1) Tersedianya dasar hukum pelaksanaan kemitraan: Terkait dengan dasar hukum pelaksanaan kemitraan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan Divisi Hubungan Kelembagaan PT BNI (Persero) Tbk bernomor 137/PFM.PFMD/ KS/01/2019, Nomor. HLB/003/PKS/2019 tentang Penyaluran BPNT. Dokumen tersebut memuat hak dan kewajiban serta sanksi masing-masing mitra. Dengan durasi selama 1 tahun dan bisa direview kembali sesuai dengan rencana anggaran Kementerian Sosial.

Perjanjian Kerjasama (PKS) tidak dilakukan lagi oleh Pemerintah Daerah dengan PT BNI Cabang. Pihak Pemerintah Daerah (Dinas Sosial Kabupaten Bogor) dan PT BNI Cabang melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebijakan masing-masing. Namun, dalam tataran pelaksanaan di daerah, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan pihak PT BNI Cabang untuk kelancaran penyaluran bantuan sosial.

2) Peran dan kedudukan pemerintah dan swasta: Peran ditandai dengan adanya hak, kewajiban serta sanksi dari masing-masing mitra. Dalam menjalankan salah satu kewajiban, pemerintah mempunyai kendala yaitu data yang belum valid karena belum dilaksanakan verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah. kendala tersebut menyebabkan permasalahan lainnya yaitu penyaluran bantuan kepada masyarakat menjadi terhambat. Sedangkan untuk pihak PT BNI maka terdapat kendala terutama dalam distribusi kartu kepada penerima program. Kendala distribusi kartu ini dapat ditemui di Kecamatan Gunung Sindur dengan adanya temuan 47 KKS yang belum

terdistribusi. Pada tataran kedudukan, setiap mitra mempunyai kedudukan yang setara sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsinya masing-masing. Kedudukan tersebut dapat dianalisis dari

tanggungjawab masing-masing yang termuat dalam dokumen perjanjian kerjasama. Peran dan kedudukan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Peran Stakeholders dalam Program BPNT

No.	Stakeholders	Peran
1	Pemerintah	Penyiapan data KPM, Penyiapan Ewarong, Sosialiasi dan Edukasi, Penyiapan Bantuan,
2	Perbankan/Himbara	Penyiapan agen bank, Sosialisasi dan Edukasi ke KPM dan Ewarong, Registrasi dan Aktivasi Kartu, Penyaluran Bantuan,
3	Ewarong/Agen bank	Penyaluran Bantuan, Koordinasi dengan penyedia bahan pangan (BULOG),
4	Pendamping	Validasi data KPM, Sosialisasi dan Edukasi ke KPM, pendampingan KPM
5	Masyarakat	Data dalam Muskel/Musdes

Sumber. Diolah dari Pedoman Umum BPNT, 2017

3)Terdapatnya mekanisme pertanggung jawaban:

Pertanggungjawaban kemitraan antara Kementerian Sosial dan PT BNI (Persero) Tbk dilakukan dalam bentuk tertulis yang disampaikan setiap bulan yang memuat progress penyaluran bantuan dan kendala yang ditemukan serta secara realtime melalui dashboard program BPNT. Pelaporan secara realtime dengan menggunakan dashboard masih belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari penggunaan dashboard yang belum userfriendly dan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Padahal partisipasi masyarakat melalui informasi yang ditampilkan dalam dashboard sangat efektif dalam menjaga akuntabilitas pada program maupun kemitraan yang terjalin diantara masing-masing mitra. Sistem informasi daring atau *dashboard* dapat memuat informasi umum pelaksanaan BPNT di wilayah kerja penyalur.

Pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Sosial digunakan sebagai pembanding data penyaluran bantuan masih tidak optimal. Hal tersebut terkait dengan kendala bahwa belum pernah Dinas Sosial melakukan pelaporan secara periodik. Kendala disebabkan kurang aktifnya pendamping yaitu TKSK dan Dinas Sosial dalam meminta rekapitulasi penyaluran BPNT.

4) Tersedianya mekanisme kontrol bersama : Dalam pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan bank penyalur, tidak ditemukan adanya monitoring dan evaluasi bersama yang dilakukan antara Kemensos dan PT BNI (Persero) Tbk. Masing-masing mitra melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Monev dilakukan juga oleh Tim Pengendali Bantuan Pangan Pusat, namun tidak dilakukan oleh Tim Pengendali Bantuan Pangan Daerah.

Salah satu tugas monitoring dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan melibatkan peneliti pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta.

Dimensi akuntabilitas cukup efektif dikarenakan bahwa ketersediaan mengambil tanggungjawab diwujudkan dengan tersedianya dasar hukum pelaksanaan kemitraan di tingkat tertentu, walaupun masih terdapat kendala pada pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing mitra, partisipasi serta pelaporan secara vertikal yang belum optimal dan mekanisme kontrol yang masih dilaksanakan tidak terpadu.

b. Nilai bisnis dan insentif

Dalam melihat nilai bisnis, menurut Broogard (2018) setidaknya terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian diantaranya; 1) transfer value, nilai yang ditransfer adalah sumber daya keuangan yang diperoleh dari PPP; antara lain, pengembangan pasar dan pelanggan; 2) synergistic value, nilai sinergis merupakan manfaat inovatif yang berasal dari produk dan mode produksi baru (kolaborasi) yang penting untuk inovasi bisnis; 3) interaction and associational value, interaksi dan nilai asosiasional adalah manfaat tak berwujud berkenaan dengan hubungan eksternal bisnis, seperti reputasi, pengetahuan, dan akses ke lembaga pemerintah. Indikator sebagai berikut:

1) **Terdapatnya alasan melakukan kemitraan:** Adanya nilai atau tujuan bersama yang ingin dicapai dalam proses kemitraan yaitu untuk mencapai 6 Tepat yaitu “tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi” sesuai dengan petunjuk teknis program serta mendukung gerakan inklusi

keuangan yang digagas oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi.

2) **Keuntungan kemitraan:** Bagi Pemerintah, keuntungan yang didapat tergolong dalam nilai sinergis (synergic value) yaitu manfaat yang diterima dari pelaksanaan kemitraan berupa kemudahan administrasi, lebih transparan dan pemantauan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan. Sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah dan lebih transparan. Keuntungan yang diterima oleh PT BNI (Persero) Tbk yaitu pada Transfer value dan Interaction Value. Nilai transfer (transfer value) yang didapatkan oleh PT BNI merupakan keuntungan materil seperti ada tambahan profit/laba dari dana yang mengendap, serta penambahan nasabah baru. Sedangkan untuk interaction value bagi PT BNI (Persero) Tbk yaitu penambahan jejaring mitra dengan Kementerian Sosial serta penambahan agen 46 atau ewarong baru sebagai “kantor cabang BNI di daerah”. Nilai bisnis atau keuntungan yang didapatkan dari kemitraan telah sesuai dengan regulasi yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, disebutkan pada pasal 13 bahwa bank penyalur diberikan waktu 30 hari untuk mentrasfer dana kepada rekening penerima. Potensi pengendapan tersebut sesuai dengan regulasi yang ada.

3) **Kerugian kemitraan:** Dalam melaksanakan kemitraan, penelitian ini tidak terdapat potensi kerugian dari dilaksanakannya kemitraan antara pemerintah dan bank penyalur. Hanya pada potensi sumberdaya yang harus fokus pada program ini. Dalam struktur organisasi pemerintah dibentuk Direktorat Jenderal

Penanganan Fakir Miskin yang mempunyai tugas dalam penyaluran bantuan sosial pangan, sedangkan pada struktur kantor cabang PT BNI (Persero) Tbk terdapat Asisten Branch Banking (ABB) yang salah satu tugasnya fokus pada tanggungjawab membantu program pemerintah.

Dimensi nilai bisnis sudah efektif karena masing-masing mitra sudah mengetahui tujuan dilaksanakannya kemitraan yaitu penyaluran bantuan nontunai yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat harga serta berbagai nilai manfaat yang diterima mitra seperti nilai sinergi yang diterima pemerintah berupa kemudahan administrasi dan akuntabilitas bantuan sosial, sedangkan nilai transfer dan interaksi berupa keuntungan yang didapat pihak perbankan/bank penyalur.

c. Akses

Pendorong utama kemitraan adalah mengakses sumber daya utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan, tetapi kurang atau tidak cukup dalam cadangan individu satu aktor. Aset tersebut dapat memerlukan sumber daya keras uang dan bahan, serta sumber daya lunak yang penting, seperti keterampilan manajerial dan teknis, informasi, kontak, dan kredibilitas/ legitimasi (Brinkerhoff and Brinkerhoff, 2011). Indikator yaitu:

1) Akses terhadap sumber daya: Tidak ada akses sumber daya yang terjadi dalam kemitraan antara pemerintah dan PT BNI (Persero) Tbk di Kabupaten Bogor. Ketiadaan akses pada sumber daya tersebut bukan berarti tidak ada hubungan yang terjalin diantara mitra yang saling bekerjasama. Melainkan hubungan yang terjadi pada pelaksanaan tugas masing-masing setiap mitra. Hal tersebut mengingat setiap mitra mempunyai tugas

dan tanggung jawab yang berbeda dan sesuai kapasitas masing-masing.

2) Akses pada pengambilan keputusan bersama: Akses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan kegiatan rekonsiliasi. Perlu menjadi perhatian bahwa rekonsiliasi merupakan salah satu cara dalam pemecahan permasalahan terkait dengan kendala di lapangan yang ditemui setiap tahap penyaluran bantuan sosial pangan nontunai pelaksanaan di level pusat sudah dilaksanakan setiap tahap penyaluran/ bulan. Namun belum optimal dilaksanakan di level pemerintah daerah dengan BNI Cabang Wilayah Padanan. Padahal dampak besar dapat dirasakan dari dilaksanakannya kegiatan rekonsiliasi pada level daerah yaitu memberikan data kondisi penyaluran di daerah kepada pemerintah pusat.

Dimensi akses cukup efektif dari indikator yang ditemukan yaitu ketiadaan akses pada sumber daya berupa sharing teknologi, sumber daya manusia, maupun anggaran. Sehingga dalam prakteknya akses dipahami sebatas hak dan kewajiban yang melekat, akses pada pengambilan keputusan sudah baik di tingkat pusat namun terdapat kendala pada tingkat Kabupaten Bogor yang tidak melaksanakan kegiatan rekonsiliasi (rapat bersama) membahas kendala dan permasalahan di lapangan dengan pihak perbankan/bank penyalur.

d. Responsibilitas

Dalam konteks PPP, disebutkan bahwa PPP telah secara signifikan mengurangi kapasitas pemerintah berpartisipasi secara efektif dan mengawasi pengaturan ini dan memastikan mereka responsif terhadap tuntutan warga dan berkontribusi pada visi yang lebih luas, lebih strategis dari barang publik (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011). Indikator yang digunakan antara lain :

1) Jenis permasalahan: Kendala kemitraan antara pemerintah dan bank penyalur pada aspek teknis yaitu ditemukan adanya saldo nol seperti yang terjadi di Kecamatan Leuwiliang sejumlah 600 penerima program dari 900 kuota terkendala masalah saldo nol, permasalahan kartu rusak/patah/terblokir yang ditemui pada hampir setiap daerah di Kabupaten Bogor, permasalahan pada kartu hilang serta permasalahan pada rekening yang gagal dibuka (Burekol) karena ketersediaan data yang masih belum memenuhi unsur pembukaan rekening.

2) Terdapatnya mekanisme pengaduan masyarakat: mekanisme pengaduan tidak tercantum dalam klausul Perjanjian Kerjasama (PKS) Namun terdapat mekanisme pengaduan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan media yang dapat digunakan seperti aplikasi LAPOR!, SMS, WA, maupun melalui email. Mekanisme pengaduan lainnya dapat secara langsung dengan mendatangi pendamping TKSK, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, PT BNI Wilayah Padanan, maupun kepada Tim Koordinasi Bantuan Pangan Provinsi dan Kabupaten. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa mekanisme pengaduan masyarakat di Kabupaten Bogor belum efektif dikarenakan masyarakat belum mengetahui bagaimana mekanisme pengaduan serta aspek kecepatan penanganan keluhan yang masih lambat baik dari pendamping TKSK, Pemerintah Daerah maupun dari PT BNI (Persero) Tbk.

Dimensi responsibilitas cukup efektif dengan indikator bahwa permasalahan yang ditemui masih cukup banyak sehingga masyarakat penerima bantuan terkendala untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, pada indikator mekanisme pengaduan masyarakat tidak tercantum dalam klausul perjanjian, sehingga permasalahan terjadi di lapangan dengan

temuan bahwa masyarakat tidak mengetahui bagaimana solusi dari permasalahan penyaluran bantuan seperti kartu hilang maupun saldo kosong.

2. Manfaat Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai (BPNT) di Kabupaten Bogor

Menurut Singh and Prakesh (2010) yang menyatakan bahwa kemitraan dijalankan antara pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Tujuan tersebut merupakan nilai akhir yang diinginkan bersama dan menjadi tujuan bersama. Bahkan salah satu tujuan kemitraan adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, *“Partnership has most commonly been promoted as a means to enhancing governance effectiveness”* (Brinkerhoff dan Brinkerhoff, 2011).

a. Sumber daya

Menurut Ronald MqQuaid (2000), pada dasarnya kemitraan akan meningkatkan skala sumberdaya yang ada dalam kemitraan. Sumberdaya tersebut diartikan sebagai kemudahan dalam pencairan program serta adanya penambahan kompetensi dari pelaksana program. Indikator sebagai berikut:

1) Kemudahan pencairan bantuan: Dalam mencapai kemudahan pencairan bantuan, terdapat agen/ewarong sebagai tempat penyaluran bantuan sosial, namun terdapat kendala yaitu kuota agen/ewarong yang tidak ideal untuk melayani KPM yang sangat banyak. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Suka Makmur, jumlah KPM yang dilayani sebesar 10.052 orang, sementara jumlah agen/ewarong hanya sebanyak 5 (lima) ewarong, dengan kapasitas melayani sebesar 1.250 orang atau hanya sebesar 12% . Sama halnya dengan Kecamatan Gunung Putri, 1 (satu)

ewarong melayani penyaluran bantuan sebanyak 825 KPM. Kondisi demikian menjadikan penyaluran bantuan menjadi terhambat. Kondisi demikian menyebabkan indikator kemudahan pencairan bantuan sebagai bagian dari dimensi meningkatkan skala kapasitas sumber daya tidak terpenuhi.

2) Penambahan kompetensi pelaksana program: Peningkatan kapasitas dilakukan di Kabupaten Bogor. Mekanisme peningkatan kapasitas tersebut dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada target yang berbeda. Pelaksanaan tersebut melibatkan pemerintah maupun bank penyalur. Pada target masyarakat, pengenalan kartu nontunai, cara penggunaan, kerahasiaan PIN menjadi materi yang sangat penting disampaikan. Pada target ewarong materi yang disampaikan pada teknis penggunaan mesin EDC serta bimbingan teknis mengelola usaha yang disampaikan oleh bank penyalur. Pada target pemerintah daerah maupun pendamping materi yang disampaikan adalah pengenalan program, pengelolaan data terpadu, serta pedoman umum program BPNT.

Pada dimensi sumber daya ditemukan bahwa manfaat yang didapatkan sangat kecil. Hal tersebut dikarenakan jumlah tempat penyaluran bantuan masih tidak sesuai dengan jumlah masyarakat penerima bantuan sehingga penyaluran bantuan menjadi terhambat. Walaupun pengenalan program melalui sosialisasi sudah dilaksanakan untuk memberikan kelancaran pada penyaluran bantuan.

b. Efektif dan Efisien

Salah satu manfaat kemitraan Public Private Partnership (PPP) menjadikan layanan yang efektif dan meningkatkan kualitas layanan, *“PPPs, when appropriately structured and implemented,*

help address specific cost and investment challenges, deliver improvements in service efficiency, and enhance service quality” (Torchia et al, 2015). Menurut Osborne, (2000) kunci dari kebijakan publik di seluruh dunia yaitu bagaimana mencapai efektivitas dan efisiensi pada pelaksanaan suatu kebijakan.

1) Tepat waktu: Program penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Pemkab Bogor efektif dan efisien dilihat dari indikator ketepatan waktu. Hal tersebut berkaitan dengan penyaluran yang dilakukan setiap bulan. Walaupun pada tahap awal, penyaluran dilaksanakan 2 bulan sekali terutama terjadi pada bulan November-Desember 2018. Pemkab Bogor melaksanakan tahap awal penyaluran pada November 2018 sampai penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2019. Dengan demikian penyaluran bantuan telah dilaksanakan sebanyak enam kali sesuai dokumen yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

2) Tepat jumlah: Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bogor memenuhi unsur tepat jumlah yaitu sebesar Rp.110.000/bulan/penerima. Pemerintah maupun bank penyalur tidak melakukan pemotongan biaya transaksi maupun administrasi kartu bulanan pada program ini. Sehingga masyarakat tidak dibebankan biaya-biaya tambahan. Kendala pada program ini terdapat pemberlakuan sistem pembelian paket sembako di semua wilayah di Kabupaten Bogor yang dapat merugikan penerima program. Sehingga jumlah kilogram (kg) beras maupun komoditas lain seperti telur akan berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Sistem paket sembako tidak sesuai dengan tujuan dari program yaitu memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bertransaksikanpun dan berapapun rupiah yang ditukar.

3)Tepat sasaran: Hasil penelitian menunjukkan sasaran penerima program adalah keluarga yang sudah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun permasalahannya adalah pada validitas data penerima dengan kondisi eksisting penerima program. Hal tersebut dikarenakan data yang ada dalam BDT merupakan hasil susenas 2015. Data tersebut seharusnya dilakukan pengecekan kembali melalui kegiatan verifikasi dan validasi data oleh pemerintah daerah. Temuan di lokus penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah daerah belum pernah melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data tersebut. Sehingga terdapat potensi perubahan kondisi penerima program.

Pada dimensi efektif dan efisien, manfaat yang dirasakan masyarakat sangat besar dikarenakan penyaluran bantuan dilakukan tepat waktu, tidak ada pemotongan bantuan serta diberikan pada orang yang membutuhkan.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Bogor tidak sepenuhnya efektif. Pada dimensi akuntabilitas kemitraan dinilai cukup efektif dengan beberapa kendala yang ditemui yaitu pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga adanya potensi ketidaktepatan sasaran, distribusi kartu kepada penerima program belum maksimal, pelaporan secara realtime dengan menggunakan dashboard penyaluran BPNT yang belum maksimal, pemerintah daerah yang tidak melaksanakan mekanisme pelaporan kepada pemerintah pusat serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang tidak dilakukan antar mitra.

Pada dimensi nilai bisnis dan insentif tidak ditemukan adanya kendala, sehingga kemitraan dinilai sangat efektif. Kemitraan yang dilaksanakan sudah mempunyai arah tujuan bersama yang jelas, adanya nilai lain yang akan dicapai mitra, serta potensi kerugian yang tidak ditemukan dalam penelitian ini. Dimensi akses menunjukkan bahwa kemitraan dinilai cukup efektif dengan alasan tidak adanya akses pada masing-masing sumberdaya kemitraan, meskipun media untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan telah ada yaitu melalui kegiatan rekonsiliasi. Pada dimensi responsivitas, kemitraan dinilai cukup efektif dengan beberapa kendala teknis yang ditemukan dan mekanisme pengaduan masyarakat yang belum digunakan secara optimal.

Hasil penelitian pada derajat kemanfaatan dari kemitraan yang dilaksanakan ditemukan bahwa kemitraan tersebut belum menunjukkan tingkat kemanfaatan yang besar. Pada dimensi peningkatan kapasitas sumberdaya menunjukkan bahwa kebutuhan akan ewarong belum optimal dikarenakan kondisi eksisting masih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan, mekanisme peningkatan kompetensi dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan PT BNI (Persero) Tbk. Pada dimensi efektivitas dan efisiensi pada program, kemitraan dinilai mempunyai manfaat yang besar terutama pada ketepatan waktu, dan ketepatan jumlah walaupun terdapat pemberlakuan sistem pembelian paket sembako yang dapat merugikan penerima program, serta ditemukan ketidaktepatan sasaran karena proses verifikasi dan validasi yang tidak pernah dilakukan pada lokus penelitian.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan diantaranya, pada dimensi akuntabilitas dengan menjadikan proses verifikasi dan validasi sebagai salah satu kriteria penentuan daerah yang akan melaksanakan penyaluran bantuan sosial

nontunai, regulasi tambahan maupun SOP terkait dengan pelaporan secara *bottom-up*, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi bersama antar mitra. Pada dimensi akses dapat dilakukan dengan menambahkan *sharing* sumberdaya sebagai salah satu klausul perjanjian. Pada dimensi responsivitas dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi fokus pada aspek pengaduan serta menyusun standar layanan yang memuat jenis layanan pengaduan dan kecepatan layanan. Pada dimensi peningkatan kapasitas sumberdaya dilakukan penambahan kuota ewarong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melibatkan peran serta masyarakat, pendamping dan pemerintah desa untuk mengusulkan tambahan ewarong tersebut, merekomendasikan untuk mengganti sistem pembelian paket sembako secara paket dengan memberikan kebebasan pada masyarakat untuk melaksanakan transaksi sesuai kebutuhan, penyamaan persepsi bagi pemerintah dan swasta mengenai kinerja program yang berorientasi pada prosentase transaksi masyarakat bukan pada jumlah sisa saldo, merekomendasikan untuk melaksanakan verifikasi dan validasi dengan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brinkerhoff, Derick W and Jennifer M. Brinkerhoff. (2011). *Public-Private Partnership: Perspective on Purpose, Publicness, and Good Governance*. Public Administration and Development. Public Adm. Dev. 31, pp 2-14
- Hilton, Davis and Lorraine. (2007). *Working in Partnership Through Early Support: Distance Learning Text (Working with Parents in Partnership)*. Departemen: Education and Skill
- McQuaid, Ronald W. (2000). *The Theory of Partnership: Why have Partnership*. Stephen Osborne (Ed.). *Public Private Partnership: Theory and Practice in International Perspective*. New York: Routledge
- Osborne, Steven. (2000). *Public Private Partnership: Theory and Practice in International Perspective*. New York: Routledge
- Jurnal**
- Ahmad, Muhammad Azhar Ikram. (2001). *Poverty Alleviation and The Third World*. Pakistan Economic and Social Review, Vol. 39, No. 1 (Summer 2001), pp. 49-56 Published by: Department of Economics, University of the Punjab
- Brogaard, Lena. (2018). *Business Value in Public-Private Partnerships: The Positive Impact of Trust and Task-Relevant Competencies on Business Outcomes in PPPs*. International Public Management Journal. DOI: 10.1080/10967494.2018.1457107
- Daigneault, Pierre-Marc. (2014). *Three Paradigms of Social Assistance*. SAGE Open. October-December 2014: 1-8
- Forrer, John., James Edwin Kee, Kathryn E Newcomer and Eric Boyer. *Public Private Partnership and the Public Acontability Question*. Public Administration Review, Vol. 70, No. 3 (May | June 2010), pp. 475-484
- Huda, Ary Miftahul. Antun Mardiyanta. Erna Setijaningrum. (2018). *Can publicprivate partnership policy reduce poverty and grow sustainable economies in indonesia? (case study approach)*. E3S Web of Conferences 74, 01005 (2018). ICSolCA 2018
- Klijn, E.H. and Teisman, G.R. (2003). *Institutional and strategic Barriers to Public-Private Partnership: An Analysis of Dutch Cases*, Public Money and management July

- Panggabean, Adrian TP. (2006). *Expanding Acces to Basic Service in Asia and The Pacific Region: Public-Private Partnership for Poverty Reduction*. ERD Working Paper No.87 Philippines: Asian Development Bank
- Pillay, Hitendra. James J Watters, Luzhoff and Matthew Flynn. (2014). *Dimensions of Effectiveness and Efficiency: A Case Study on Industry–School Partnerships*. Journal of Vocational Education and Training Vol 66 No 44 hal 537-553
- Singh, A. and Prakash, G. (2010). *Public–Private Partnerships in Health Services Delivery: A Network Organizations Perspective*. Public Management Review, 12:6 pages 829–56
- Suripto. (2006). *The Accountability and Transparency of Partnership Programs at The Local Level: A Case Study for the Management of Contracting Out at The Regency of Sleman*. Journal of Sosiosains. Volume 19 No I. Januari 2006. The School of Pascasarjana UGM. Yogyakarta
- Torchia, Mariateresa. Andrea Calabro and Michele Morner. (2015). *Public-Private Partnership in The Health Care Sector: A Systemic Review of The Literature*. Public Management Review Vol 17 No. 2, pp 236-261
- Van Ham, H., & Koppenjan, J. (2001). *Building public–private partnerships: Assessing and managing risks in port development*. Public Management Review, 3(4), 593–616
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2018). *Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2012-2017*. Katalog Nomor: 1306017.32. No Publikasi: 32520.1806
- MicroSave. (2018). *Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Operasional Assesment*. Paparan Maret 2018

Website

- Milward, H. Brinton, and Keith G. Provan. (2006). *A Managers Guide to Choosing and Using Collaborative Networks*. Washington, ment.
<http://www.businessofgovernment.org/pdfs/ProvanReport>

Dokumen

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019* Nomor 56/07/Th.XXII, 15 Juli 2019